



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Nomor : 7399/P.01/12/2013

6 Desember 2013

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : **Seleksi Gelombang Ke – II Program Beasiswa
Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2014**

Kepada Yth.:

- 1. Biro/Bagian Kepegawaian/SDM Kementerian/Lembaga;**
 - 2. Biro Sumber Daya Manusia POLRI;**
 - 3. BKD Provinsi/Kab/Kota.**
- (Daftar terlampir)

Sejalan dengan fungsi Bappenas sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana dan sebagai Instansi Penyelenggara Diklat Perencanaan Pembangunan, di dalam rencana anggaran Bappenas Tahun Anggaran 2014, Bappenas kembali akan memberi kesempatan bagi Staf Perencana yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, Unit Perencanaan di Kementerian/Lembaga, Bappeda atau nama lain, dan Unit Perencanaan di Dinas Teknis pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk memperoleh Beasiswa Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) pada Tahun Anggaran 2014 dalam mengikuti program diklat gelar baik di dalam maupun di luar negeri.

Apabila Saudara berminat dan dapat memanfaatkan Beasiswa Pusbindiklatren ini untuk meningkatkan kapasitas institusi Saudara melalui peningkatan kompetensi para Staf Perencana, mohon kiranya mengirimkan pengusulan calon penerima Beasiswa Program Gelar dengan melampirkan formulir bermaterai dan bertandatangan asli yang sudah dilengkapi (harus diisi semua) untuk setiap program yang diminati, kepada Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Bappenas. Peserta yang akan kami proses adalah peserta yang diusulkan oleh instansinya (minimal Eselon II), dengan menyebutkan nama peserta yang diusulkan tersebut, yang telah memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan, belum pernah mengambil/memiliki Gelar S2 untuk yang melamar beasiswa S2. Surat usulan, formulir dan dokumen pendukung dapat disampaikan langsung atau dikirim melalui pos/titipan kilat ke Pusbindiklatren Bappenas, dengan alamat Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat 10320, paling lambat tanggal **17 Januari 2014** (cap pos/stempel pos). Untuk Program Seleksi Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas, kami tidak akan memproses usulan dan formulir yang disampaikan melalui faksimili.

Untuk informasi lebih lanjut lebih lanjut silakan menghubungi Kantor Pusbindiklatren Bappenas di nomor telepon (021) 319 31447, 319 34147, e-mail address: pusbindiklatren@bappenas.go.id, atau di situs: <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>.

Jadwal Seleksi Gelombang Ke – II Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2014 sebagai berikut:

NO.	PROGRAM	WAKTU
1	TPA	8 Maret 2014
2	TOEFL	29 Maret 2014
3	Pemanggilan Peserta S2 <i>Lingkage</i>	April 2014
4	Pemanggilan Peserta S2 Dalam Negeri	Mei 2014

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan
dan Pelatihan Perencana



Ir. Yahya Rachmana Hidayat, M.Sc., Ph.D
NIP 19620323 198903 1 003

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga
2. Deputi Sumber Daya Manusia POLRI
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Sesmen PPN/Sestama Bappenas
5. PPK DM IV Sesmen PPN/Sestama Bappenas

Kepada Yth.:

A. BIRO KEPEGAWAIAN/SDM DAN PUSDIKLAT KEMENTERIA/LEMBAGA:

1. Sekretariat Negara;
2. Kementerian Agama;
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Kementerian Perhubungan;
6. Kementerian Perindustrian;
7. Kementerian Perdagangan;
8. Kementerian Pertanian;
9. Kementerian Koperasi dan UKM;
10. Kementerian Kehutanan;
11. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Kementerian Sosial;
13. Kementerian Kesehatan;
14. Kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif;
15. Kementerian Lingkungan Hidup;
16. Kementerian PDT (Pembangunan Desa Tertinggal);
17. Kementerian Perumahan Rakyat;
18. Kementerian Pekerjaan Umum;
19. Kementerian Hukum & HAM;
20. Kementerian Pemuda & Olah Raga;
21. Kementeria Dalam Negeri;
22. Kementerian Koordinator Perekonomian;
23. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
24. BAKOSURTANAL (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional);
25. BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir);
26. BKN (Badan Kepegawaian Negara);
27. BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal);
28. BPS (Badan Pusat Statistik);
29. BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional);
30. BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika);
31. LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional);
32. LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia);
33. ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia);
34. LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
35. POLRI (Polisi Republik Indonesia).

**B. SETDA/BADAN/BIRO/BAGIAN KEPEGAWAIAN PROVINSI/KABUPATEN/
KOTA:**

1. Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

- 1.1. Kabupaten Aceh Barat
- 1.2. Kabupaten Aceh Barat Daya
- 1.3. Kabupaten Aceh Besar
- 1.4. Kabupaten Aceh Jaya
- 1.5. Kabupaten Aceh Selatan
- 1.6. Kabupaten Aceh Singkil
- 1.7. Kabupaten Aceh Tamiang
- 1.8. Kabupaten Aceh Tengah
- 1.9. Kabupaten Aceh Tenggara
- 1.10. Kabupaten Aceh Timur
- 1.11. Kabupaten Aceh Utara
- 1.12. Kabupaten Bener Meriah
- 1.13. Kabupaten Bireuen
- 1.14. Kabupaten Gayo Lues
- 1.15. Kabupaten Nagan Raya
- 1.16. Kabupaten Pidie
- 1.17. Kabupaten Pidie Jaya
- 1.18. Kabupaten Simeulue
- 1.19. Kota Banda Aceh
- 1.20. Kota Langsa
- 1.21. Kota Lhokseumawe
- 1.22. Kota Subang
- 1.23. Kota Subulussalam

2. Provinsi Sumatera Utara

- 2.1. Kabupaten Asahan
- 2.2. Kabupaten Batubara
- 2.3. Kabupaten Dairi
- 2.4. Kabupaten Deli Serdang
- 2.5. Kabupaten Hubang Hasudutan
- 2.6. Kabupaten Karo
- 2.7. Kabupaten Labuhanbatu
- 2.8. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 2.9. Kabupaten Labuhanbatu Utara
- 2.10. Kabupaten Langkat
- 2.11. Kabupaten Mandailing Natal
- 2.12. Kabupaten Nias

- 2.13. Kabupaten Nias Barat
- 2.14. Kabupaten Nias Selatan
- 2.15. Kabupaten Nias Utara
- 2.16. Kabupaten Padang Lawas
- 2.17. Kabupaten Padang Lawas Utara
- 2.18. Kabupaten Pakpak Bharat
- 2.19. Kabupaten Samosir
- 2.20. Kabupaten Serdang Bedagai
- 2.21. Kabupaten Simalungun
- 2.22. Kabupaten Tapanuli Selatan
- 2.23. Kabupaten Tapanuli Tengah
- 2.24. Kabupaten Tapanuli Utara
- 2.25. Kabupaten Toba Samosir

- 2.26. Kota Binjai
- 2.27. Kota Gunungsitoli
- 2.28. Kota Medan
- 2.29. Kota Padangsidempuan
- 2.30. Kota Pematangsiantar
- 2.31. Kota Sibolga
- 2.32. Kota Tanjungbalai
- 2.33. Kota Tebing Tinggi

3. Provinsi Sumatera Barat

- 3.1. Kabupaten Agam
- 3.2. Kabupaten Dharmasraya
- 3.3. Kabupaten Kepulauan Mentawai
- 3.4. Kabupaten Lima Puluh Kota
- 3.5. Kabupaten Padang Pariaman
- 3.6. Kabupaten Pesaman
- 3.7. Kabupaten Pesaman Barat
- 3.8. Kabupaten Pesisir Selatan
- 3.9. Kabupaten Sijunjung
- 3.10. Kabupaten Solok
- 3.11. Kabupaten Solok Selatan
- 3.12. Kabupaten Tanah Datar

- 3.13. Kota Tebingtinggi
- 3.14. Kota Padang
- 3.15. Kota Padangpanjang
- 3.16. Kota Pariaman
- 3.17. Kota Payakumbuh
- 3.18. Kota Sawahlunto
- 3.19. Kota Solok

4. Provinsi Sumatera Selatan

- 4.1. Kabupaten Banyuasin
- 4.2. Kabupaten Empat Lawang
- 4.3. Kabupaten Lahat
- 4.4. Kabupaten Muara Enim

- 4.5. Kabupaten Musi Banyuasin
- 4.6. Kabupaten Musi Rawas
- 4.7. Kabupaten Ogan Ilir
- 4.8. Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 4.9. Kabupaten Ogan Komering Ulu
- 4.10. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- 4.11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 4.12. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- 4.13. Kota Lubuklinggau
- 4.14. Kota Pagar Alam
- 4.15. Kota Palembang
- 4.16. Kota Prabumulih

5. Provinsi Lampung

- 5.1. Kabupaten Lampung Tengah
- 5.2. Kabupaten Lampung Utara
- 5.3. Kabupaten Lampung Selatan
- 5.4. Kabupaten Lampung Barat
- 5.5. Kabupaten Lampung Timur
- 5.6. Kabupaten Tulang Bawang
- 5.7. Kabupaten Tanggamus
- 5.8. Kabupaten Way Kanan
- 5.9. Kabupaten Pesawaran
- 5.10. Kabupaten Pringsewu
- 5.11. Kabupaten Mesuji
- 5.12. Kabupaten Tulang Bawang
- 5.13. Kota Bandar Lampung
- 5.14. Kota Metro

6. Provinsi Jambi

- 6.1. Kabupaten Batanghari
- 6.2. Kabupaten Bungo
- 6.3. Kabupaten Kerinci
- 6.4. Kabupaten Merangin
- 6.5. Kabupaten Muaro Jambi
- 6.6. Kabupaten Sarolangun
- 6.7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 6.8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 6.9. Kabupaten Tebo
- 6.10. Kota Jambi
- 6.11. Kota Sungai Penuh

7. Provinsi Bengkulu

- 7.1. Kabupaten Bengkulu Selatan
- 7.2. Kabupaten Bengkulu Tengah
- 7.3. Kabupaten Bengkulu Utara
- 7.4. Kabupaten Bengkulu Kaur

- 7.5. Kabupaten Bengkulu Kepahingan
- 7.6. Kabupaten Bengkulu Lebong
- 7.7. Kabupaten Bengkulu Mukomuko
- 7.8. Kabupaten Bengkulu Rejang Lebong
- 7.9. Kabupaten Bengkulu Seluma
- 7.10. Kota Bengkulu
- 7.11. Kota Tanjung Pinang

8. Provinsi Kepulauan Riau

- 8.1. Kabupaten Bintan
- 8.2. Kabupaten Karimun
- 8.3. Kabupaten Kepulauan Anambas
- 8.4. Kabupaten Linggau
- 8.5. Kabupaten Natuna
- 8.6. Kota Batam
- 8.7. Kota Tanjung Pinang

9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 9.1. Kabupaten Bangka
- 9.2. Kabupaten Bangka Barat
- 9.3. Kabupaten Bangka Selatan
- 9.4. Kabupaten Bangka Tengah
- 9.5. Kabupaten Belitung
- 9.6. Kabupaten Belitung Timur
- 9.7. Kota Pangkal Pinang

10. Provinsi Riau

- 10.1. Kabupaten Bengkalis
- 10.2. Kabupaten Indragiri Ilir
- 10.3. Kabupaten Indragiri Hulu
- 10.4. Kabupaten Kampar
- 10.5. Kabupaten Kuantan Singgigi
- 10.6. Kabupaten Pelalawan
- 10.7. Kabupaten Rokan Hilir
- 10.8. Kabupaten Rokan Hulu
- 10.9. Kabupaten Siak
- 10.10. Kabupaten Kepulauan Meranti
- 10.11. Kota Dumai
- 10.12. Kota Pekanbaru

11. Provinsi Banten

- 11.1. Kabupaten Tangerang
- 11.2. Kabupaten Serang
- 11.3. Kabupaten Lebak
- 11.4. Kabupaten Pandegelang

- 11.5. Kota Tangerang
- 11.6. Kota Tangerang Selatan
- 11.7. Kota Serang
- 11.8. Kota Cilegon

12. Provinsi DKI Jakarta

- 12.1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 12.2. Kota Administrasi Jakarta Barat
- 12.3. Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 12.4. Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 12.5. Kota Administrasi Jakarta Timur
- 12.6. Kota Administrasi Jakarta Utara

13. Provinsi Jawa Barat

- 13.1. Kabupaten Bandung
- 13.2. Kabupaten Bandung Barat
- 13.3. Kabupaten Bekasi
- 13.4. Kabupaten Bogor
- 13.5. Kabupaten Ciamis
- 13.6. Kabupaten Cianjur
- 13.7. Kabupaten Cirebon
- 13.8. Kabupaten Garut
- 13.9. Kabupaten Indramayu
- 13.10. Kabupaten Kerawang
- 13.11. Kabupaten Kuningan
- 13.12. Kabupaten Majalengka
- 13.13. Kabupaten Pangandaran
- 13.14. Kabupaten Purwakarta
- 13.15. Kabupaten Subang
- 13.16. Kabupaten Sukabumi
- 13.17. Kabupaten Sumedang
- 13.18. Kabupaten Tasikmalaya

- 13.19. Kota Bandung
- 13.20. Kota Banjar
- 13.21. Kota Bekasi
- 13.22. Kota Bogor
- 13.23. Kota Cimahi
- 13.24. Kota Cirebon
- 13.25. Kota Depok
- 13.26. Kota Sukabumi
- 13.27. Kota Tasikmalaya

14. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- 14.1. Kabupaten Bantul
- 14.2. Kabupaten Gunung Kidul
- 14.3. Kabupaten Kulon Progo
- 14.4. Kabupaten Sleman

15. Provinsi Jawa Tengah

- 15.1. Kabupaten Banjarnegara
- 15.2. Kabupaten Banyumas
- 15.3. Kabupaten Batang
- 15.4. Kabupaten Blora
- 15.5. Kabupaten Boyolali
- 15.6. Kabupaten Brebes
- 15.7. Kabupaten Cilacap
- 15.8. Kabupaten Demak
- 15.9. Kabupaten Grobogan
- 15.10. Kabupaten Karanganyar
- 15.11. Kabupaten Kebumen
- 15.12. Kabupaten Kendal
- 15.13. Kabupaten Klaten
- 15.14. Kabupaten Kudus
- 15.15. Kabupaten Magelang
- 15.16. Kabupaten Pati
- 15.17. Kabupaten Pekalongan
- 15.18. Kabupaten Pemalang
- 15.19. Kabupaten Purbalingga
- 15.20. Kabupaten Purworejo
- 15.21. Kabupaten Rembang
- 15.22. Kabupaten Semarang
- 15.23. Kabupaten Sragen
- 15.24. Kabupaten Sukoharjo
- 15.25. Kabupaten Tegal
- 15.26. Kabupaten Temanggung
- 15.27. Kabupaten Wonogiri
- 15.28. Kabupaten Wonosobo

- 15.29. Kota Jepara
- 15.30. Kota Magelang
- 15.31. Kota Pekalongan
- 15.32. Kota Salatiga
- 15.33. Kota Semarang
- 15.34. Kota Surakarta
- 15.35. Kota Tegal

16. Provinsi Jawa Timur

- 16.1. Kabupaten Bangkalan
- 16.2. Kabupaten Banyuwangi
- 16.3. Kabupaten Blitar
- 16.4. Kabupaten Bojonegoro
- 16.5. Kabupaten Bondowoso
- 16.6. Kabupaten Gresik
- 16.7. Kabupaten Jember
- 16.8. Kabupaten Jombang
- 16.9. Kabupaten Kediri

- 16.10. Kabupaten Lamongan
- 16.11. Kabupaten Lumajang
- 16.12. Kabupaten Madiun
- 16.13. Kabupaten Magetan
- 16.14. Kabupaten Kepanjen
- 16.15. Kabupaten Mojokerto
- 16.16. Kabupaten Nganjuk
- 16.17. Kabupaten Ngawi
- 16.18. Kabupaten Pacitan
- 16.19. Kabupaten Pamekasan
- 16.20. Kabupaten Pasuruan
- 16.21. Kabupaten Ponorogo
- 16.22. Kabupaten Probolinggo
- 16.23. Kabupaten Sampang
- 16.24. Kabupaten Sidoarjo
- 16.25. Kabupaten Situbondo
- 16.26. Kabupaten Sumenep
- 16.27. Kabupaten Trenggalek
- 16.28. Kabupaten Tuban
- 16.29. Kabupaten Tulungagung

- 16.30. Kota Batu
- 16.31. Kota Blitar
- 16.32. Kota Kediri
- 16.33. Kota Madiun
- 16.34. Kota Malang
- 16.35. Kota Mojokerto
- 16.36. Kota Pasuruan
- 16.37. Kota Probolinggo
- 16.38. Kota Surabaya

17. Provinsi Bali

- 17.1. Kabupaten Badung
- 17.2. Kabupaten Bangi
- 17.3. Kabupaten Buleleng
- 17.4. Kabupaten Gianyar
- 17.5. Kabupaten Jembrana
- 17.6. Kabupaten Karangasem
- 17.7. Kabupaten Klungkung
- 17.8. Kabupaten Tabanan

- 17.9. Kota Denpasar

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

- 18.1. Kabupaten Bima
- 18.2. Kabupaten Dompu
- 18.3. Kabupaten Lombok Barat
- 18.4. Kabupaten Lombok Tengah

- 18.5. Kabupaten Lombok Timur
- 18.6. Kabupaten Lombok Utara
- 18.7. Kabupaten Sumbawa
- 18.8. Kabupaten Sumbawa Barat
- 18.9. Kota Bima
- 18.10. Kota Mataram

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

- 19.1. Kabupaten Alor
- 19.2. Kabupaten Belu
- 19.3. Kabupaten Ende
- 19.4. Kabupaten Flores Timur
- 19.5. Kabupaten Kupang
- 19.6. Kabupaten Lembata
- 19.7. Kabupaten Malaka
- 19.8. Kabupaten Manggarai
- 19.9. Kabupaten Manggarai Barat
- 19.10. Kabupaten Manggarai Timur
- 19.11. Kabupaten Ngada
- 19.12. Kabupaten Nagekeo
- 19.13. Kabupaten Rote Ndao
- 19.14. Kabupaten Sabu Raijua
- 19.15. Kabupaten Sikka
- 19.16. Kabupaten Sumba Barat
- 19.17. Kabupaten Sumba Barat Daya
- 19.18. Kabupaten Sumba Tengah
- 19.19. Kabupaten Sumba Timur
- 19.20. Kabupaten Timur Tengah Selatan
- 19.21. Kabupaten Timur Tengah Utara
- 19.22. Kota Kupang

20. Provinsi Kalimantan Barat

- 20.1. Kabupaten Bengkayang
- 20.2. Kabupaten Kapuas Hulu
- 20.3. Kabupaten Kayong Utara
- 20.4. Kabupaten Ketapang
- 20.5. Kabupaten Kubu Raya
- 20.6. Kabupaten Landak
- 20.7. Kabupaten Melawai
- 20.8. Kabupaten Pontianak
- 20.9. Kabupaten Sambas
- 20.10. Kabupaten Sanggau
- 20.11. Kabupaten Sekadau
- 20.12. Kabupaten Sintang
- 20.13. Kota Pontianak
- 20.14. Kota Singkawang

21. Provinsi Kalimantan Selatan

- 21.1. Kabupaten Belangan
- 21.2. Kabupaten Banjar
- 21.3. Kabupaten Barito Kuala
- 21.4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 21.5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 21.6. Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 21.7. Kabupaten Kotabaru
- 21.8. Kabupaten Tabalong
- 21.9. Kabupaten Tanah Bumbu
- 21.10. Kabupaten Tanah Laut
- 21.11. Kabupaten Tapin
- 21.12. Kota Banjarbaru
- 21.13. Kota Banjarmasin

22. Provinsi Kalimantan Tengah

- 22.1. Kabupaten Barito Selatan
- 22.2. Kabupaten Barito Timur
- 22.3. Kabupaten Barito Utara
- 22.4. Kabupaten Gunung Mas
- 22.5. Kabupaten Kapuas
- 22.6. Kabupaten Katingan
- 22.7. Kabupaten Kotawaringin Barat
- 22.8. Kabupaten Kota waringin Timur
- 22.9. Kabupaten Lamandau
- 22.10. Kabupaten Murung Raya
- 22.11. Kabupaten Sukamara
- 22.12. Kabupaten Seruyan
- 22.13. Kota Palangkaraya

23. Provinsi Kalimantan Utara

- 23.1. Kabupaten Bulungan
- 23.2. Kabupaten Malinau
- 23.3. Kabupaten Nunukan
- 23.4. Kabupaten Tana Tidung
- 23.5. Kota Tarakan

24. Provinsi Kalimantan Timur

- 24.1. Kabupaten Berau
- 24.2. Kabupaten Kutai Barat
- 24.3. Kabupaten Kutai Kartanegara
- 24.4. Kabupaten Mahakam Ulu
- 24.5. Kabupaten Paser
- 24.6. Kabupaten Penajam Paser Utara

- 24.7. Kota Balikpapan
- 24.8. Kota Bontang
- 24.9. Kota Samarinda

25. Provinsi Sulawesi Selatan

- 25.1. Kabupaten Bantaeng
- 25.2. Kabupaten Barru
- 25.3. Kabupaten Bone
- 25.4. Kabupaten Bulukumba
- 25.5. Kabupaten Enrekang
- 25.6. Kabupaten Gowa
- 25.7. Kabupaten Jeneponto
- 25.8. Kabupaten Kepulauan Selayar
- 25.9. Kabupaten Luwu
- 25.10. Kabupaten Luwu Timur
- 25.11. Kabupaten Luwu Utara
- 25.12. Kabupaten Maros
- 25.13. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 25.14. Kabupaten Pinrang
- 25.15. Kabupaten Sidenreng Rappang
- 25.16. Kabupaten Sinjai
- 25.17. Kabupaten Soppeng
- 25.18. Kabupaten Takalar
- 25.19. Kabupaten Tana Toraja
- 25.20. Kabupaten Toraja Utara
- 25.21. Kabupaten Wajo

- 25.22. Kota Makassar
- 25.23. Kota Palopo
- 25.24. Kota Parepare

26. Provinsi Sulawesi Tenggara

- 26.1. Kabupaten Bombana
- 26.2. Kabupaten Buton
- 26.3. Kabupaten Buton Utara
- 26.4. Kabupaten Kolaka
- 26.5. Kabupaten Kolaka Timur
- 26.6. Kabupaten Kolaka Utara
- 26.7. Kabupaten Konawe
- 26.8. Kabupaten Konawe Selatan
- 26.9. Kabupaten Konawe Utara
- 26.10. Kabupaten Muna
- 26.11. Kabupaten Wakatobi

- 26.12. Kota Bau – Bau
- 26.13. Kota Kendari

27. Provinsi Sulawesi Tengah

- 27.1. Kabupaten Banggai
- 27.2. Kabupaten Banggai Kepulauan
- 27.3. Kabupaten Banggai Laut
- 27.4. Kabupaten Buol
- 27.5. Kabupaten Donggala
- 27.6. Kabupaten Morowali
- 27.7. Kabupaten Parigi Moutong
- 27.8. Kabupaten Poso
- 27.9. Kabupaten Tojo Una – Una
- 27.10. Kabupaten Toli – Toli
- 27.11. Kabupaten Sigi
- 27.12. Kota Palu

28. Provinsi Sulawesi Utara

- 28.1. Kabupaten Bolaang Mongondow
- 28.2. Kabupaten Banggai Mangondow Selatan
- 28.3. Kabupaten Banggai Mangondow Timur
- 28.4. Kabupaten Banggai Mangondow Utara
- 28.5. Kabupaten Kepulauan Sangihe
- 28.6. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- 28.7. Kabupaten Kepulauan Talaud
- 28.8. Kabupaten Minahasa
- 28.9. Kabupaten Minahasa Selatan
- 28.10. Kabupaten Minahasa Tenggara
- 28.11. Kabupaten Minahasa Utara
- 28.12. Kota Bitung
- 28.13. Kota Kotamobagu
- 28.14. Kota Manado
- 28.15. Kota Tomohon

29. Provinsi Sulawesi Barat

- 29.1. Kabupaten Majene
- 29.2. Kabupaten Minahasa
- 29.3. Kabupaten Mamuju
- 29.4. Kabupaten Mamuju Tengah
- 29.5. Kabupaten Mamuju Utara
- 29.6. Kabupaten Polewali Mandar

30. Provinsi Gorontalo

- 30.1. Kabupaten Boalemo
- 30.2. Kabupaten Bone Bolango
- 30.3. Kabupaten Gorontalo
- 30.4. Kabupaten Gorontalo Utara
- 30.5. Kabupaten Puhuwonto

30.6. Kota Gorontalo

31. Provinsi Maluku

- 31.1. Kabupaten Baru
- 31.2. Kabupaten Baru Selatan
- 31.3. Kabupaten Kepulauan Aru
- 31.4. Kabupaten Maluku Barat Daya
- 31.5. Kabupaten Maluku Tengah
- 31.6. Kabupaten Maluku Tenggara
- 31.7. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- 31.8. Kabupaten Kepulauan Seram Bagian Barat
- 31.9. Kabupaten Kepulauan Seram Bagian Timur
- 31.10. Kota Ambon
- 31.11. Kota Tual

32. Provinsi Maluku Utara

- 32.1. Kabupaten Halmahera Barat
- 32.2. Kabupaten Halmahera Tengah
- 32.3. Kabupaten Halmahera Utara
- 32.4. Kabupaten Halmahera Timur
- 32.5. Kabupaten Pulau Morotai
- 32.6. Kabupaten Pulau Taliabu
- 32.7. Kota Ternate
- 32.8. Kota Tidore Kepulauan

33. Provinsi Papua

- 33.1. Kabupaten Asmat
- 33.2. Kabupaten Biak Nunfor
- 33.3. Kabupaten Boven Digoel
- 33.4. Kabupaten Deiyai
- 33.5. Kabupaten Dogiyai
- 33.6. Kabupaten Intan Jaya
- 33.7. Kabupaten Jayapura
- 33.8. Kabupaten Jayawijaya
- 33.9. Kabupaten Keerom
- 33.10. Kabupaten Kepulauan Yapen
- 33.11. Kabupaten Lanny Jaya
- 33.12. Kabupaten Memberamo Raya
- 33.13. Kabupaten Memberamo Tengah
- 33.14. Kabupaten Mappi
- 33.15. Kabupaten Merauke
- 33.16. Kabupaten Mimika
- 33.17. Kabupaten Nabire
- 33.18. Kabupaten Nduga
- 33.19. Kabupaten Paniai
- 33.20. Kabupaten Pegunungan Bintang

- 33.21. Kabupaten Puncak
- 33.22. Kabupaten Puncak Jaya
- 33.23. Kabupaten Sarmi
- 33.24. Kabupaten Supiori
- 33.25. Kabupaten Toikara
- 33.26. Kabupaten Waropen
- 33.27. Kabupaten Yahukimo
- 33.28. Kabupaten Yulimo
- 33.29. Kota Jayapura

34. Provinsi Papua Barat

- 34.1. Kabupaten Fakfak
- 34.2. Kabupaten Kaimana
- 34.3. Kabupaten Manokwari
- 34.4. Kabupaten Manokwari Selatan
- 34.5. Kabupaten Maybrat Arfak
- 34.6. Kabupaten Pegunungan Arfak
- 34.7. Kabupaten Raja Ampat
- 34.8. Kabupaten Sorong
- 34.9. Kabupaten Sorong Selatan
- 34.10. Kabupaten Tambrau
- 34.11. Kabupaten Teluk Bintuni
- 34.12. Kabupaten Teluk Wondama
- 34.13. Kota Sorong



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

INFORMASI PROGRAM BEASISWA
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2014

A. PROGRAM BEASISWA YANG DITAWARKAN:

1. Program S3 Dalam Negeri: Peserta dapat memilih salah satu program studi di Universitas Dalam Negeri yang direkomendasikan oleh Pusbindiklatren. Khusus untuk program S3 Dalam Negeri, penerima beasiswa Pusbindiklatren Bappenas untuk program S3 diberi waktu 1 (satu) tahun untuk melamar di perguruan tinggi yang mempunyai kerjasama dengan Pusbindiklatren Bappenas;
2. Program S2 Dalam Negeri di 18 program studi pada 11 universitas dalam negeri yang direkomendasikan oleh Pusbindiklatren Bappenas;
3. Program S2 *Linkage* tahun akademis 2014 pada 7 universitas di Indonesia yang bekerjasama dengan universitas di luar negeri, peserta program ini akan mengikuti kuliah selama 1 tahun di salah satu universitas di Indonesia dan 1 tahun berikutnya di luar negeri dan mendapat dua gelar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Sebelum kuliah S2 *Linkage* dimulai, Pusbindiklatren juga memberikan beasiswa persiapan Bahasa Inggris di Pusat Bahasa yang ditujukan oleh Pusbindiklatren selama 5,5 bulan bagi peserta yang mempunyai nilai TOEFL sekurang – kurangnya 450, untuk mencapai nilai IELTS 6,5.
 - Apabila pesertatidak dapat mencapai nilai IELTS 6,5 yang bersangkutan masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan nilai IELTS selama mengikuti tahun pertama program S2 *Linkage* di Indonesia.
 - Apabila tidak lulus seleksi ke luar negeri, maka pada tahun kedua peserta akan meneruskan di dalam negeri dan untuk itu hanya memperoleh 1 gelar dari universitas di dalam negeri.
 - Mereka yang tidak lulus seleksi luar negeri tersebut, jika nilai IETS – nya lebih dari 6,5 akan mendapatkan biaya hidup selama jangka waktu program regular pada program studi yang diambil (18 bulan).
 - Sedangkan bagi mereka yang tidak lulus seleksi luar negeri karena nilai IELTS kurang dari 6,5 hanya akan mendapatkan biaya hidup sampai dengan 15 bulan.
4. Persiapan Bahasa Inggris EAP (*English for Academic Purposes*) untuk program S2 di luar negeri. Program ini memanfaatkan Beasiswa S2 pemerintah asing atau institusi internasional yang selama ini telah tersedia bagi Indonesia, Australia Awards dari Australia, dan beasiswa hibah lainnya. Untuk itu, Pusbindiklatren akan memberikan beasiswa persiapan Bahasa Inggris EAP (*English for Academic Purposes*) di Jakarta selama 5,5 bulan bagi peserta yang mempunyai nilai TOEFL sekurang – kurangnya 450 dan apabila nilai TOEFL peserta (selama atau setelah kursus) telah mencapai

580, Pusbindiklatren akan memfasilitasi peserta untuk memperoleh Beasiswa S2 tersebut di atas.

B. PERSYARATAN CALON PESERTA

1	DIKLAT GELAR				
	S3 DN CS VI	S2 DN	S2 LINKAGE		EAP S2 LN
			BELANDA	AUSTRALIA	
2	3	4	5	6	
I. SYARAT ADMINISTRATIF					
a. Pengusulan dari Instansi	Min UKE II	Min UKE II	Min UKE II	Min UKE II	Min UKE II
b. Unit Kerja	Perencana	Perencana	Perencana	Perencana	Perencana
c. PNS 100% Gol III/a Minimal	2 tahun	2 tahun	2 tahun	2 tahun	2 tahun
d. Stara Pendidikan Minimal	S2	S1	S1	S1	S1
e. Minimal Tahun Lulus S1/S2	2 tahun	2 tahun	2 tahun	2 tahun	2 tahun
f. Umur Maksimal	40 tahun	40 tahun	38 tahun	38 tahun	38 tahun
g. IPK Minimal	3,2	2,5	2,75	2,75	2,75
II. SELEKSI NASIONAL					
a. TPA (Tes Potensi Akademik)					
- Pusat	565	525	525	525	525
- Pusat Luar Jawa	565	525	525	525	525
- Pemda Jawa	565	525	525	525	525
- Pemda Luar Jawa	565	500	500	500	500
b. TOEFL Seleksi Minimum					
TOEFL Setelah EAP	500/550	400	450	450	450
c. Wawancara					
	Menunjukkan Komitmen	Menunjukkan Komitmen	Menunjukkan Komitmen	Menunjukkan Komitmen	Menunjukkan Komitmen

C. PILIHAN PROGRAM STUDI

Program S2 Dalam Negeri dengan Pembiayaan Cost Sharing Type I dan VI

1. Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Syiah Kuala;
2. Magister Perencanaan Pembangunan, Universitas Andalas;
3. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia;
4. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung;
5. Magister Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung;
6. Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada;
7. Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada;
8. Magister Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya;
9. Program Perencanaan Wilayah Konsentrasi Studi Manajemen Perencanaan, Universitas Hasanudin;
10. Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro;
11. Magister Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Institut Pertanian Bogor;
12. Magister Ekonomi Pembangunan & Perencanaan, Univeritas Padjajaran;
13. Magister Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya;
14. Magister Ilmu Lingkungan Bid. Perencanaan Pengelolaan SDA, Universitas Padjajaran;
15. Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro;
16. Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia;
17. Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada;
18. Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Padjajaran.

Program S2 LINKAGE

A) S2 LINKAGE Jepang:

NO.	UNIVERSITAS DI INDONESIA	BIDANG STUDI DI INDONESIA	UNIVERSITAS DI JEPANG	BIDANG STUDI DI JEPANG
1.	PPIE Universitas Indonesia	Ilmu Ekonomi & Ekonomi Pembangunan	a. Grad. Sch. Of Int'l Relations/ International IUJ (University of Japan)	International Development Program Economics, Development Economics, Public Policy, Urban & Regional Planning, Development Planning
			b. Hiroshima University	Economic, Development Economic
			c. Int'l Grad. Sch. Of Social Science/Yokohama National University	Economic, Development Economic
			d. GRIPS (Graduate Institute for Public Studies)	Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City & Regional Planning
			e. Kobe University	Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations& Public Administration
2.	MEP Universitas Gadjah Mada	Ekonomi & Ekonomi Pembangunan	a. GRIPS (Graduate Institute for Public Studies)	Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City & Regional Planning
			b. Grad. Sch. Of Int'l Relations/ International IUJ (University of Japan)	International Development Program Economics, Development Economics, Public Policy, Urban & Regional Planning, Development Planning
			c. Hiroshima University	Economic, Development Economic
			d. Takushoku University	International Development Studies, Economic & Development Economics, Urban & Regional Planning, Development Planning & Public Administration
			e. Kobe University	Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations& Public Administration
			f. Int'l Grad. Sch. Of Social Science/Yokohama National University	Economic, Development Economic
3.	MPWK Intitut Teknologi Bandung	Perencanaan Wilayah Kota	a. GRIPS (Graduate Institute for Public Studies)	Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City & Regional Planning
			b. Ritsumeikan University	Economics, International Relations, Public Science, Environmental & Urba Engenering, Accounting and Management
			c. Kobe University	Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations& Public Administration

NO.	UNIVERSITAS DI INDONESIA	BIDANG STUDI DI INDONESIA	UNIVERSITAS DI JEPANG	BIDANG STUDI DI JEPANG
			d. Grad. Sch. Of Media and Governance/Keio University	Media & Governance, Public Administration
4.	MPKD Universitas Gadjah Mada	Perencanaan Kota dan Daerah	a. GRIPS (Graduate Institute for Public Studies)	Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City & Regional Planning
			b. Ritsumeikan University	Economics, International Relations, Public Science, Environmental & Urba Engenering, Accounting and Management
			c. Takushoku University	International Development Studies, Economic & Development Economics, Urban & Regional Planning, Development Planning & Public Administration
			d. Kobe University	Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations& Public Administration
			e. Grad. Sch. Of Media and Governance/Keio University	Media & Governance, Public Administration
5.	MIAP FIA Universitas Brawijaya	Administrasi Publik	a. GRIPS (Graduate Institute for Public Studies)	Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City & Regional Planning
			b. Ritsumeikan University	Economics, International Relations, Public Science, Environmental & Urba Engenering, Accounting and Management
			b. Takushoku University	International Development Studies, Economic & Development Economics, Urban & Regional Planning, Development Planning & Public Administration
6.	MIKM FK Universitas Padjadjaran	Ilmu Kesehatan Masyarakat	c. Gunma University	Public Health

B) S2 LINKAGE Australia:

NO.	UNIVERSITAS DI INDONESIA	BIDANG STUDI DI INDONESIA	UNIVERSITAS DI AUSTRALIA	BIDANG STUDI DI AUSTRALIA
1.	MPKD Universitas Gadjah Mada	Perencanaan Kota dan Daerah	b. Curtin University (Australia), Faculty of Humanities	Urban & Regional Planning Management

C) S2 LINKAGE Belanda:

NO.	UNIVERSITAS DI INDONESIA	BIDANG STUDI DI INDONESIA	UNIVERSITAS DI BELANDA	BIDANG STUDI DI BELANDA
1.	MPKD Universitas Gadjah Mada	Perencanaan Kota dan Daerah	IHS (Institute for Housing and Urban Development Studies), Rotterdam	Development Planning and Management
2.	MPWK Institut Teknologi Bandung	Perencanaan Wilayah Kota	RUG (Rijks Universiteit Groningen) & ITC Enschede	Development Planning and Infrastructure Management
3.	PPIE Universitas Indonesia	Ilmu Ekonomi & Ekonomi Pembangunan	Vrije University Amsterdam, ISS, The Hague, Tillburg University, RUG (Rijks Universiteit Groningen)	Programme in Economics or Economic Development

NO.	UNIVERSITAS DI INDONESIA	BIDANG STUDI DI INDONESIA	UNIVERSITAS DI BELANDA	BIDANG STUDI DI BELANDA
4.	GEO INFO Universitas Gadjah Mada	Geography	ITC Entschede	Programme in Geoinformation for Spatial Planning and Risk Management
5.	PPs Universitas Sriwijaya	Integrated Lowland Development and Management Planning	UNESCO, IHE, Delft	Integrated Lowland Management

Program S3 Dalam Negeri

1. Universitas Diponegoro : Ilmu Ekonomi
2. Universitas Padjadjaran : Manajemen Bisnis
3. Institut Pertanian Bogor : 1) Ekonomi Pertanian;
2) Penyuluhan Pembangunan;
3) Sosialisasi Pedesaan; dan
4) Komunikasi Pembangunan Pertanian & Pedesaan.
4. Universitas Gadjah Mada : 1) Ekonomi;
2) Manajemen; dan
3) Kebijakan Publik.
5. Institut Teknologi Bandung : 1) Planologi, Teknik dan Manajemen Industri;
2) Perencanaan Wilayah dan Kota.
6. Universitas Brawijaya : Ilmu Administrasi dan Ilmu Ekonomi.
7. Universitas Indonesia : Ilmu Ekonomi.

Program Peningkatan Bahasa Inggris (EAP)

Program pelatihan peningkatan bahasa Inggris EAP (*English for Academic Purposes*) dilaksanakan sekurang – kurangnya selama 5,5 bulan, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris , bagi mereka yang berminat untuk melamar ke program S2 Luar Negeri dengan mempergunakan dana hibah. Setelah mengikuti program EAP, peserta diharapkan sudah memenuhi syarat untuk melamar ke universitas pilihan di berbagai negara yang diminati.

D. PROSEDUR PELAMARAN

1. Mereka yang berhak melamar program beasiswa Pusbindiklatren adalah mereka yang memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan di atas dan belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 maupun sedang mengikuti kuliah S2 untuk yang melamar beasiswa S2, serta belum pernah mengambil/memiliki gelar S3 maupun yang sedang mengikuti kuliah S3 untuk yang melamar beasiswa S3 dengan mengisi formulir pendaftaran dan diusulkan secara resmi oleh instansi asalnya melalui pejabat pengelola kepegawaian atau atasan langsung (minimal eselon II). Surat usulan yang dimaksud harus menyebutkan nama – nama pegawai yang diusulkan oleh instansi dan program/topik beasiswa yang diminati;
2. Pelamar yang diprioritaskan adalah para: a) Perencana Fungsional Perencana; b) Perencana di instansi Perencanaan atau yang bekerja di unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan; c) PNS lain yang direncanakan bekerja di instansi atau unit perencanaan;

3. Pusbindiklatren telah mengirimkan formulir pendaftaran ke seluruh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Sekda dan BKD. Untuk mendapatkan formulir tersebut dapat menghubungi pejabat yang bersangkutan atau dapat di *download* pada situs kami:
<http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>
4. Pendaftaran dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:
 - a. Melalui Pos : Pengiriman formulir pendaftaran yang **bermaterai dan bertandatangan asli** dengan persetujuan dari atasan langsung (minimal eselon II). Kami tidak akan memproses usulan yang disampaikan melalui *Facsimile*;
 - b. Melalui Email : Pengiriman formulir pendaftaran yang **bermaterai dan bertandatangan asli** dengan persetujuan atasan langsung (minimal eselon II) ke alamat *email*:
pusbindiklatren@bappenas.go.id dengan subyek:
PENDAFTARAN SELEKSI BEASISWA
PUSBINDIKLATREN TAHUN 2014.
5. Ke – dua proses pengiriman formulir pendaftaran melalui dua cara di atas (4a dan 4b) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dikirim lewat pos, yaitu:
 - a. Ijazah dan transkrip S1/S2 yang telah dilegalisir;
 - b. Fotocopy SK Pengangkatan PNS 100% pada golongan III/a atau SK Jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
 - c. Khusus bagi para Pejabat Fungsional Perencana harus melampirkan SK Jabatan Terakhir yang dilegalisir;
 - d. Pernyataan Rencana Studi (dalam bentuk esai) sebagaimana format terlampir (**Lampiran 2**).
6. Peserta yang memenuhi syarat administrasi (MS), lulus TPA dan TOEFL akan diproses penempatannya selama 2 (dua) tahun (selama nilai TPA dan TOEFL – nya masih berlaku), asal diusulkan kembali oleh atasan langsung (minimal eselon II), kecuali ada surat pembatalan pencalonan dari instansi asalnya (minimal eselon II).
Formulir serta dokumen pendukungnya **dapat disampaikan langsung** kepada Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas Jl. Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat 10320

E. KOMPONEN BIAYA BEASISWA BAGI PROGRAM GELAR S2 LINKAGE

1. Pembiayaan diklat menjadi tanggungan bersama antara Pusbindiklatren dan instansi asal peserta dalam suatu mekanisme pembiayaan bersama (*Cost Sharing Type I*);
2. Kemampuan instansi pengirim untuk menanggung biaya ini dikirimkan kepada Pusbindiklatren dalam bentuk Surat Kesediaan *Cost Sharing* (setelah ada kepastian penempatan calon peserta);
3. Komponen – komponen pembiayaan yang menjadi bagian dari Pusbindiklatren dan Instansi Asal Peserta dibagi menjadi:

a) **Komponen yang dibiayai oleh Pusbindiklatren:**

UANG KULIAH	SESUAI PROGRAM STUDI
Tunjangan Biaya Hidup Luar Kota	Rp.1.600.000,-/bulan
Tunjangan Biaya Hidup Dalam Kota	Rp.1.000.000,-/bulan
Tunjangan Riset	Rp.6.500.000,-(Max)
Tunjangan biaya hidup di atas termasuk biaya hidup dan operasional yaitu: transportasi lokal, pembelian alat tulis, sewa komputer dan fotocopy artikel.	

b) **Komponen yang dibebankan kepada Pemda atau Instansi Asal Peserta:**

- 1) Transport dan akomodasi seleksi peserta (keikutsertaan peserta dalam seleksi TPA dan TOEFL);
- 2) Transport kedatangan awal program (1 kali) dan kepulangan di akhir program (1 kali);
- 3) Tunjangan penempatan awal, minimal 5 hari perdiem;
- 4) Berlangganan internet;
- 5) Tambahan uang saku; dan
- 6) Biaya proses pengurusan dokumen keberangkatan peserta.

F. KOMPONEN BIAYA BEASISWA BAGI PROGRAM GELAR S2 DAN S3 DALAM NEGERI

Mekanisme pembiayaan untuk beasiswa program gelar dalam negeri terbagi ke dalam 2 kategori yaitu: dengan mekanisme *cost sharing type I* dan *cost sharing type VI*.

Mekanisme *cost sharing type I*

1. Pembiayaan diklat menjadi tanggungan bersama antara Pusbindiklatren dan instansi asal peserta, dalam suatu mekanisme pembiayaan bersama (*cost sharing*);
2. Kesanggupan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menanggung biaya ini dikirimkan kepada Pusbindiklatren dalam bentuk Surat Kesediaan *cost sharing* (setelah terdapat kepastian penempatan calon peserta);
3. Komponen – komponen pembiayaan yang menjadi bagian dari Pusbindiklatren dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dibagi menjadi:

a) **Komponen yang dibiayai oleh Pusbindiklatren:**

UANG KULIAH	SESUAI PROGRAM STUDI
Tunjangan Biaya Hidup Luar Kota	Rp.1.600.000,-/bulan
Tunjangan Biaya Hidup Dalam Kota	Rp.1.000.000,-/bulan
Tunjangan Riset (S2)	Rp.6.500.000,-(Max)
Tunjangan Riset (S3)	Rp.12.000.000,-(Max)
Tunjangan biaya hidup di atas termasuk biaya hidup dan operasional yaitu: transportasi lokal, pembelian alat tulis, sewa komputer dan fotocopy artikel.	

b) **Komponen yang dibebankan kepada Pemda atau Instansi Asal Peserta:**

- 1) Transport dan akomodasi seleksi peserta (keikutsertaan peserta dalam seleksi TPA dan TOEFL);
- 2) Transport kedatangan awal program (1 kali) dan kepulangan di akhir program (1 kali);
- 3) Tunjangan penempatan awal, minimal 5 hari perdiem;
- 4) Berlangganan internet; dan
- 5) Tambahan uang saku.



FORMAT PERNYATAAN RENCANA STUDI

- Paragraf 1 : Latar Belakang Pendidikan sebelumnya, S1 untuk yang bermaksud mengambil program S2;
- Paragraf 2 : Riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja yang berisikan uraian tugas dan fungsi pokok pekerjaan sehari – hari;
- Paragraf 3 : Alasan memilih bidang studi yang diinginkan serta dikaitkan dengan latar belakang pendidikan sebelumnya dan dengan tugas dan fungsi pokok pekerjaan sehari – hari;
- Paragraf 4 : Rencana tindak atau *action plan* yang akan dilakukan setelah mendapat gelar pendidikan yang lebih tinggi (S2) dikaitkan dengan tugas dan fungsi pokok pekerjaannya serta dampaknya terhadap kinerja instansi asal pada khususnya dan terhadap negara ini pada umumnya.



(Surat Kesiediaan Cost-Sharing Tipe I)

LAMPIRAN 3

(tempat, tanggal/bulan/tahun)

Nomor :
Lampiran : (berkas)
Perihal : **Kesiediaan Pembiayaan Diklat**
an.: 1. Sdr. X
2. Sdr. Y
3. Sdr. Z

Kepada Yth.:

Sdr. Kepala Pusbindiklatren Bappenas

di –

Jakarta

Sehubungan dengan surat Kepala Pusbindiklatren Bappenas Nomor: /P.01/12/2013, tanggal 6 Desember 2013, perihal Seleksi Gelombang II Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2014, bahwa mengenai ketentuan pembiayaan *cost sharing* untuk program gelar yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr. X, Y, dan Z dengan pengaturan biaya sebagai berikut:

NO.	NAMA PESERTA	ITEM MANDATORY	JUMLAH (dalam Rp.)	ITEM VULANTORY	ITEM VOLUNTARY (dalam Rp.)
1	X				
2	Y				
3	Z				

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah **Xxxx**

Dr. Ir. XXxxx Yyyyy, MA., M.Sc.
NIP 19XXYYZZ YYYYYA B XXX

Tembusan:

1. Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Penyelenggara Diklat;
3. Sesmeneg PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
4. Peserta diklat yang bersangkutan.

Catatan:

- Mandatory : adalah porsi pendanaan yang menjadi **kewajiban** instansi asal berupa:
a) Transport kedatangan dan kepulangan ke lokasi studi (kecuali ke luar negeri atau *linkage*);
b) Uang saku.
- Voluntary : adalah porsi pendanaan yang secara **sukarela** akan ditanggung oleh instansi asal.



(Surat Kesiediaan Cost-Sharing Tipe VI)

LAMPIRAN 4

(tempat, tanggal/bulan/tahun)

Nomor :
Lampiran : (berkas)
Perihal : **Kesiediaan Pembiayaan Diklat**
an.: 1. Sdr. X
2. Sdr. Y
3. Sdr. Z

Kepada Yth.:

Sdr. Kepala Pusbindiklatren Bappenas

di –

Jakarta

Sehubungan dengan surat Program Pascasarjana, Universitas Nomor: /...../2014, tgl/Bln/Th., perihal ketentuan pembiayaan *cost sharing type VI* untuk Program Gelar Pascasarjana, Universitas Program yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr. X, Y, dan Z dengan pengaturan biaya sebagai berikut:

NO.	NAMA PESERTA	ITEM MANDATORY	JUMLAH (dalam Rp.)	ITEM VOLUNTARY	ITEM VOLUNTARY (dalam Rp.)
1	X				
2	Y				
3	Z				

Demikian, mohon kami mendapat jawaban atas usulan kami tersebut di atas dalam waktu tidak terlalu lama. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah **Xxxx**

Dr. Ir. XXxxx Yyyyy, MA., M.Sc.
NIP 19XXYYZZ YYYYYA B XXX

Tembusan:

1. Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Penyelenggara Diklat;
3. Sesmeneg PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
4. Peserta diklat yang bersangkutan.

Catatan:

- Mandatory : adalah porsi pendanaan yang menjadi **keajiban** instansi asal pada mekanisme *cost sharing* tipe VI berupa:
- a) Transport kedatangan dan kepulangan ke lokasi studi dalam rangka seleksi dan studi peserta;
 - b) Transport pergi-pulang (kota asal-kota tempat diklat);
 - c) Tunjangan Penempatan awal, minimal 5 hari perdiem; jika tidak dapat pulang pergi ke tempat asal dan harus mencari pondokan di tempat diklat;
 - d) Biaya hidup;
 - e) Tunjangan buku;
 - f) Tunjangan studi lainnya (ATK, photocopy artikel, langganan email, transport lokal);
 - g) Tambahan uang saku.
- Voluntary : adalah porsi pendanaan yang secara **sukarela** akan ditanggung oleh instansi asal.

PUSBINDIKLATREN BAPPENAS

FORMULIR CALON PENERIMA BEASISWA PROGRAM PASCASARJANA DAN DOKTOR (ISILAH SEMUA KETERANGAN DENGAN JELAS DAN BENAR, HARUS DI ISI SEMUA DENGAN HURUF BALOK/BESAR)

1. Nama (sesuai ijazah terakhir) :
2. NIP :
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Jenis Kelamin: (L / P)*
4. Alamat Rumah :
: Kode Pos:
Kab. Kota Provinsi
- Telepon/Fax/HP : (.....)
5. Email – address :
6. Nama Instansi Asal :
(sebutkan nama kementerian/lembaga/Pemda asal Saudara)
7. Nama Unit Kerja (eselon II/III) :
(sebutkan unit tempat Saudara bekerja sekarang)
8. Alamat Unit Kerja :
: Kode Pos:
Kab. Kota Provinsi
- Telepon/Fax : (.....)
9. Jabatan Sekarang : Golongan:
10. Unit/Bagian Tempat Bekerja :
11. Uraian Secara Singkat Pekerjaan Saudara :
saat ini
.....
.....
TMT PNS 100% pada Gol. III/a pada S1/...../..... Masa Kerja.....
12. Pendidikan Terakhir S1 / S2 PT
Fakultas (S1/S2) Jurusan:
Lulus tahun (S1/S2) : IPK: Skala:
13. Selain Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas apakah sedang mengikuti / dalam proses Beasiswa S2 / S3
Dalam/Luar Negeri di Institusi Lainnya : Ya / Tidak.*
14. Pilihan rencana studi S2 (daftar ada butir C lampiran 1 halaman 2 s.d. 5 di atas):
Tulis urutan prioritas pilihan di dalam kurung yang tersedia.
(....) Program S2 Regular Dalam Negeri (tuliskan 5 pilihan universitas):
[....]
[....]
[....]
[....]
[....]
(....) Program S2 Linkage Belanda/Jepang/Australia (1 tahun di Indonesia & 1 tahun di Belanda/Jepang/Australia,
dan memperoleh gelar dari Dalam Negeri dan Luar Negeri).
[....] MPWK – ITB & RUG Groningen/ITC, Entsched [....] MPKD – UGM & Universitas di Jepang
[....] MPKD – UGM & IHS Rotterdam [....] MEP – UGM & Universitas di Jepang
[....] PPIE UI & VU Amsterdam, ISS, The Hague/Tillburg Univ. [....] MPWK – ITB & Universitas di Jepang
[....] Geografi UGM – ITC, Entsched [....] PPIE – UI & Universitas di Jepang
[....] UNSRI – IHE, UNESCO [....] MIAP FIA – UB & Universitas di Jepang
[....] MIL – UNPAD & Twente University [....] MET – UPAD & Universitas di Jepang
[....] MPKD – UGM & Curtin University (Australia) [....] MIKM FK – UNPAD & Gunma Univ. di Jepang (Public Health)

